

**IMPLEMENTASI HAK PEMULIHAN PENGHAPUSAN KONTEN
BERMUATAN SEKSUAL BAGI KORBAN *REVENGE PORN*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI**

Oleh

Irene Olivia Siregar, NIM 2114101083

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali; serta (2) mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali dalam mengupayakan pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun data yang menunjang penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik studi kepustakaan, teknik observasi, dan teknik wawancara. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan bentuk penerapan *purposive sampling* yang mana berdasarkan kebutuhannya, maka ditetapkan Direktorat Siber Kepolisian Daerah Bali sebagai informan utama dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Bali sebagai narasumber pendukung. Dalam penelitian ini data diolah dan dianalisa secara kualitatif yang meliputi tiga tahap utama, yaitu tahap pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ditressiber Polda Bali masih belum optimal dalam mengimplementasikan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* karena tuntutan kewenangan yang dititikberatkan pada penyelenggaraan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan; serta (2) Adapun hambatan dalam yang dihadapi Ditressiber Polda Bali dalam mengupayakan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* meliputi penyelenggaraan penegakan hukum satu sisi kepada pelaku, keterbatasan kewenangan pembekuan oleh kepolisian, sulitnya menjangkau penyebaran konten, dan kompleksitas prosedur administrasi dalam upaya percepatan penghapusan.

Kata Kunci: Hak Pemulihan, Penghapusan Konten Bermuatan Seksual, Korban *Revenge Porn*.

**IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO RECOVERY THROUGH
THE REMOVAL OF SEXUALLY CHARGED CONTENT FOR
REVENGE PORN VICTIMS IN THE JURISDICTION
OF THE BALI REGIONAL POLICE**

By

Irene Olivia Siregar, NIM 2114101083

Law Departement

ABSTRACT

The purpose of this research is to (1) find out the implementation of the right to recover the removal of sexually charged content for revenge porn victims in the jurisdiction of the Bali Regional Police; and (2) to know the inhibiting factors faced by the Directorate of Cyber Investigation of the Bali Regional Police in seeking to fulfill the right to recover the removal of sexually charged content for revenge porn victims. The type of research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The data that supports this research is sourced from primary data and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this research include literature study techniques, observation techniques, and interview techniques. The determination of the research sample uses a non-probability sampling technique in the form of the application of purposive sampling which based on its needs, the Cyber Directorate of the Bali Regional Police was designated as the main informant and the Women and Children Protection Unit of the Bali Regional Police as supporting resource persons. In this study, data was processed and analyzed qualitatively which included three main stages, namely the data collection and reduction stage, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research show that (1) the Bali Police Directorate is still not optimal in implementing the right to recover the removal of sexually charged content for revenge porn victims due to the demands of authority focused on the implementation of law enforcement through the investigation and investigation process; and (2) The obstacles faced by the Bali Police Directorate in seeking the right to recover the right to remove sexually charged content for revenge porn victims include the implementation of one-sided law enforcement against the perpetrators, the limitation of freezing authority by the police, the difficulty of reaching the dissemination of content, and the complexity of administrative procedures in an effort to accelerate removal.

Keywords: *Right to Recovery, Removal of Sexual Content, Revenge Porn Victims.*